

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM
UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA PENGELOLAAN
HUTAN MANGROVE
(STUDI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Skripsi

Oleh

Putri Wulandari

NPM. 2116041099



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM
UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA PENGELOLAAN
HUTAN MANGROVE
(STUDI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

Putri Wulandari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE (STUDI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh

PUTRI WULANDARI

Permasalahan utama penelitian ini adalah penurunan kualitas fungsi mangrove di wilayah pesisir, yang berperan sebagai pelindung daratan dari gelombang laut dan abrasi yang mengancam masyarakat sekitar. Latar belakang penelitian menyoroti pentingnya partisipasi kelompok tani hutan dalam menjaga ekosistem mangrove, dengan tinjauan terhadap proses penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari anggota kelompok tersebut di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner berisi 24 item pernyataan terkait partisipasi, diikuti analisis deskriptif untuk menghitung rata-rata skor partisipasi dan uji *Mann-Whitney U* dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk membandingkan tingkat partisipasi antara dua kecamatan. Model Arnstein (1969) digunakan sebagai alat analisis Hasil menunjukkan partisipasi kelompok tani hutan secara umum dalam kategori baik dengan rata-rata skor 2,89, serta tidak ada perbedaan signifikan antara kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai, yang menunjukkan prospek positif untuk penguatan partisipasi dalam konservasi mangrove. Namun terdapat Indikator terendah yaitu *non-participation* dengan nilai rata-rata 2,58, bahwa informasi yang diterima lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi daripada membangun dialog dua arah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KTH di Kabupaten Lampung Timur dalam peningkatan partisipasi anggota sehingga partisipasi dapat berubah dari sekedar formalitas menuju partisipasi sejati yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove.

Kata Kunci: Mangrove; Partisipasi; Kelompok Tani Hutan; Rehabilitasi.

ABSTRACT

PARTICIPATION OF FOREST FARMERS GROUPS (KTH) IN FOREST AND LAND REHABILITATION EFFORTS IN MANGROVE FOREST MANAGEMENT (A STUDY OF EAST LAMPUNG REGENCY)

By

PUTRI WULANDARI

The main issue of this study is the decline in the quality of mangrove functions in coastal areas, which serve as protection for the mainland from sea waves and abrasion that threaten the surrounding communities. The background of the study highlights the importance of forest farmer group participation in preserving the mangrove ecosystem, with a review of the research process involving data collection from group members in East Lampung Regency. The research was conducted using a descriptive quantitative method through the distribution of a questionnaire containing 24 items related to participation, followed by descriptive analysis to calculate the average participation score and a Mann-Whitney U test with a significance level of 0.05 to compare the level of participation between the two subdistricts. Arnstein's model (1969) was used as an analysis tool. The results showed that the participation of forest farmer groups was generally in the good category with an average score of 2.89, and there was no significant difference between Pasir Sakti and Labuhan Maringgai subdistricts, indicating positive prospects for strengthening participation in mangrove conservation. However, the lowest indicator was non-participation with an average score of 2.58, indicating that the information received was more for the benefit of the organization than for building a two-way dialogue. This study is expected to provide input for KTH in East Lampung Regency in increasing member participation so that participation can change from a mere formality to true participation that provides power and responsibility in mangrove management.

Keywords: Mangrove; Participation; Forest Farmers Group; Rehabilitation.

JUDUL SKRIPSI

**: PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN
(KTH) DALAM UPAYA REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN PADA
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
(STUDI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Nama Mahasiswa

: Putri Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116041099

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si.
NIP. 197209182002122002

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 198406302015042002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Si.

Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Penguji : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M. Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung,
Yang membuat pernyataan,


Putri Wulandari
NPM. 2116041099

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 11 Desember 2002 di Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Anak ketiga dari Bapak Sobirin dan Ibu Sikem. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak di TK Nurul Qomar yang diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2018. Setelahnya, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2021.

Penulis memulai studi di Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021. Selama menempuh pendidikan, penulis pernah meraih prestasi tingkat nasional, meliputi Best Essay LSP FKIP UNS 2023, Juara 1 Esai R-Fest PIK-R Unila 2023, serta menjadi Finalis LKTI ke-4 Annual conference IAPA 2023. Selain itu penulis tergabung sebagai anggota pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan pada tahun 2024 di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Selain itu Penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mandiri yang di laksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2024.

MOTTO

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”

(QS Ar-Rahman : 60)

“Setiap hari membawa hadiahnya sendiri.”

(Marcus Aurelius)

“Let It Flow”

(Putri Wulandari)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan dalam setiap proses yang penulis jalani. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kerendahan hati, karya ini penulis dedikasikan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Untuk ayah dan ibu tercinta yang selalu memberi kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta dan keikhlasan yang menguatkan hingga titik ini. Seluruh pencapaian ini penulis persembahkan untuk bapak dan ibu.

Keluarga Besar,

Yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis secara positif, memberikan motivasi untuk terus melangkah menyelesaikan karya ini.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang telah di berikan kepada penulis hingga bisa sampai pada titik ini.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kabupaten Lampung Timur)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, sayang menyadari bahwa hasil ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sobirin dan Ibu Sikem, terima kasih sudah mendukung dan melimpahkan kasih sayangnya untuk penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas setiap tetes keringat dan cinta yang telah Bapak dan Ibu curahkan.
2. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas segala waktu, bimbingan, saran, pengetahuan, dan motivasinya bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang senantiasa memberikan masukan, ilmu, motivasi, dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M. Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik lagi.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.

6. Ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen maupun staf jurusan Administrasi Negara atas lingkungan akademik yang kondusif, serta bimbingan dan arahan yang tak terhingga selama penulis menempuh pendidikan.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya dalam berbagai bentuk dalam menunjang kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan, Cintia, Nana, Dhea HG, Caza, dan Nova. Terima kasih atas dukungan dan sudah menjadi tempat berbagi cerita dan canda tawa dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini tersusun. Kalian telah menjadi bagian indah dalam perjalanan penulis.
10. Terima kasih untuk Alya, Okta, Kia, Ayu, Elfani, Fatoni, dan Eja sudah membantu penulis dan memberikan saran dalam prosesnya menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, khususnya kepada Bapak Awal Budiantoro, Ibu Siti, Bapak Malik, Bapak Didit, Bapak Syukur, Bapak Rusdi, dan Bapak Samsudin serta para responden yang telah meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teman-teman Administrasi Negara 2021, sukses menyertai untuk setiap jalan yang dipilih.
13. Semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
14. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan dan mampu menyelesaikan tahap ini dengan baik, beribu maaf untuk tubuh yang dipaksakan untuk tetap melakukan semua sekaligus baik itu untuk perkuliahan maupun pekerjaan. Terima kasih sudah tetap kuat dan semoga di mana pun berpijak, kelancaran dan kebahagiaan selalu menyertai.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini mampu memberikan manfaat, menjadi kontribusi pemikiran, dan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 11 Desember 2025

Penulis,

Putri Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.....	iv
--------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR	v
----------------------------	----------

I. PENDAHULUAN	1
-----------------------------	----------

1.1 Latar Belakang.....	1
-------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah.....	10
--------------------------	----

1.3 Tujuan Penelitian.....	10
----------------------------	----

1.4 Manfaat Penelitian.....	10
-----------------------------	----

II. TINJAUAN PUSTAKA	11
-----------------------------------	-----------

2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
-------------------------------	----

2.2 Tinjauan Partisipasi Masyarakat.....	13
--	----

2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat	13
---	----

2.2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi	14
---------------------------------------	----

2.2.3 Model Partisipasi Masyarakat.....	16
---	----

2.3 Rehabilitasi Mangrove.....	23
--------------------------------	----

2.4 Kerangka Pikir.....	26
-------------------------	----

2.5 Hipotesis Penelitian	26
--------------------------------	----

III. METODE PENELITIAN	27
-------------------------------------	-----------

3.1 Tipe Penelitian.....	27
--------------------------	----

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	27
--	----

3.3 Lokasi Penelitian	33
-----------------------------	----

3.4 Populasi dan Sampel.....	33
------------------------------	----

3.4.1 Populasi.....	33
3.4.2 Sampel	33
3.5 Tahap Pengumpulan Data.....	34
3.6 Skala Pengukuran	35
3.7 Metode Pengujian Data	36
3.7.1 Uji Validitas.....	36
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	37
3.8 Teknik Analisis Data	38
3.8.1 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.8.2 Uji Hipotesis	39
3.8.2 Analisis Deskriptif.....	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Profil KTH Wane Karya Lestari.....	42
4.1.2 Profil KTH Karya Muda Lestari.....	44
4.1.3 Profil KTH Mutiara Baru.....	47
4.1.4 Profil KTH Muara Alam Lestari.....	49
4.1.5 Profil KTH Mutiara Hijau.....	52
4.2 Karakteristik Responden	54
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	55
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	56
4.3 Analisis Deskriptif	57
4.4 Klasifikasi Tingkat Partisipasi.....	59
4.5 Analisis Data.....	60
4.5.1 Uji Normalitas.....	60
4.5.2 Uji Hipotesis (Uji Beda Nyata Menggunakan Uji <i>Mann Whitney U</i>).....	61
4.6 Hasil dan Pembahasan.....	62
4.6.1 Partisipasi Masyarakat.....	62
4.6.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	90

4.6.3 Perbedaan Partisipasi KTH di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.....	94
V. KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Luas Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Lampung	4
Tabel 2. Luas Ekosistem Mangrove di Kecamatan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2022	6
Tabel 3. KTH yang Berfokus pada Rehabilitasi Mangrove	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 5. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	29
Tabel 6. Data Anggota KTH di Lampung Timur	33
Tabel 7. Skala Pengukuran	35
Tabel 8. Daftar Interpretasi Skor Rata-rata dalam Variabel Penelitian	36
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Partisipasi KTH	36
Tabel 10. Tabel Reliabilitas pada Variabel Partisipasi KTH	38
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	55
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.	55
Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	56
Tabel 15. Statistik Tingkat Partisipasi pada X1 dan X2	58
Tabel 16. Uji Normalitas	60
Tabel 17. Uji Hipotesis: Mann Whitney U Test	61
Tabel 18. Tabel Tingkat Partisipasi	91

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Abrasi di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur	2
Gambar 2. Arnstein 1969	20
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4. Struktur KTH Wane Karya Lestari	44
Gambar 5. Struktur KTH Karya Muda Lestari	46
Gambar 6. Struktur KTH Mutiara Baru	49
Gambar 7. Struktur KTH Muara Alam Lestari	51
Gambar 8. Struktur KTH Mutiara Hijau.....	53
Gambar 9. Informasi yang di Berikan Untuk Kepentingan Organisasi (P1)	63
Gambar 10 Keputusan Diambil Tanpa Melibatkan Masukan Saya (P2)	63
Gambar 11. Partisipasi Tidak Berdampak pada Hasil Keputusan Rehabilitasi Mangrove (P3)	64
Gambar 12. Diundang Untuk Memberikan Pendapat Tanpa Ditindaklanjuti(P4) ..	66
Gambar 13. Dilibatkan Hanya Untuk Menghindari Konflik (P5).....	66
Gambar 14. Partisipasi Hanya Simbolis (P6).....	67
Gambar 15. Jarang Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan (P7)	69
Gambar 16. Tidak Mendapat Kesempatan Bernegosiasi dalam Keputusan (P8) ..	70
Gambar 17. Tidak Memiliki Ruang untuk Menyampaikan Masukan (P9).....	71
Gambar 18. Kerap Diundang Menyampaikan Pendapat (P10).....	73
Gambar 19. Pendapat Didengar, Meski Tidak Selalu Diterapkan (P11)	73
Gambar 20. Upaya Menghimpun Masukan Anggota dalam Rehabilitasi (P12) ..	74
Gambar 21. Diberikan Kesempatan dalam Memberikan Masukan dan Saran (P13)	76

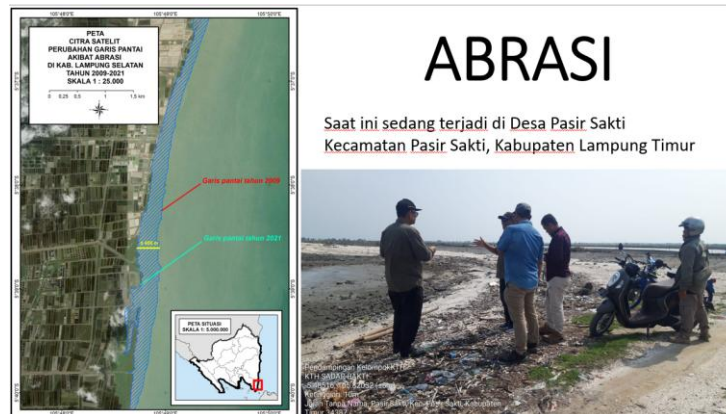
Gambar 22. Saling Menghormati Pendapat antara Saya Dan Pengambil Keputusan (P14).....	77
Gambar 23. Memiliki Peran Setara dalam Pengambilan Keputusan (P15)	77
Gambar 24. Terlibat dalam Kerja Sama Penentuan	79
Gambar 25. Keputusan Diambil Melalui Negosiasi (P17).....	80
Gambar 26. Masukan Dipertimbangkan Dalam Keputusan Rehabilitasi Mangrove (P18).....	80
Gambar 27. Memiliki Kendali atas Sumber Daya yang Digunakan Organisasi (P19).....	83
Gambar 28. Keputusan Mencerminkan Kebutuhan dalam Rehabilitasi Mangrove (P20).....	83
Gambar 29. Memiliki Suara Kuat dalam Keputusan Organisasi (P21)	84
Gambar 30. Terlibat dalam Semua Tahapan dari Perencanaan Hingga Monitoring Mangrove. (P22)	86
Gambar 31. Memiliki Pengaruh Terhadap Arah Organisasi (P23).....	87
Gambar 32. Berwenang Penuh Menentukan Kebijakan Rehabilitasi Mangrove Di Wilayah (P24)	87
Gambar 33. Diagram piramida partisipasi	92

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang ekstensif dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km membuat Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa salah satunya adalah ekosistem mangrove (Aditiasari, 2023). Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional (PNM) yang dirilis oleh Ditjen PDASHL (2021) tercatat bahwa luas total ekosistem mangrove di Indonesia mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 3.364.080 hektar. Mengutip pendapat Alikodra dalam Pribadiningtyas dkk (2013), mangrove menjadi salah satu ekosistem yang unik dan rentan mengalami kerusakan. Kerentanan tersebut di akibatkan oleh letak keberadaan mangrove berada di wilayah peralihan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Salah satu ancaman serius bagi kelangsungan hidup mangrove ialah abrasi yang diakibatkan oleh gelombang air laut.

Abrasi pantai merupakan suatu fenomena alam yang ditandai dengan pengikisan garis pantai akibat dinamika gelombang dan arus laut (Risa dkk., 2021). Proses erosi ini tidak hanya menyebabkan menyusutnya daratan dan kerusakan infrastruktur, namun juga memicu ketidakseimbangan ekosistem pesisir yang signifikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, intrusi air laut akan semakin meluas, mengancam pemukiman penduduk dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam pesisir. Abrasi terjadi di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dengan adanya perubahan pada garis pantai seluas ± 400 M dalam kurun waktu pada tahun 2009 sampai dengan 2021.



Gambar 1. Abrasi di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2021

Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan mangrove yaitu menurunnya kualitas fungsi mangrove pada wilayah pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung yang membatasi wilayah darat dan laut dari adanya gelombang laut yang dapat mengancam masyarakat sekitar pesisir serta berkurangnya wilayah daratan yang di akibatkan oleh abrasi (Hadi dkk., 2022). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi degradasi mangrove yaitu dengan melakukan upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pasal 1 dalam Ditjen PP (2023) merupakan suatu upaya yang bertujuan guna mempertahankan, memulihkan serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga produktivitas, peran dan daya dukungnya sebagai penyangga kehidupan dapat berjalan secara optimal. Rehabilitasi hutan dan lahan di lakukan guna mengembangkan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi konservasi atau fungsi lindung maupun fungsi produksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan kutipan pasal 20 huruf b yang menjelaskan mengenai rencana konservasi dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir terhadap sumber daya alam dilaksanakan dengan melakukan pemulihan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan mangrove serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir. Mengutip pendapat Febryano dalam Alfandi dkk (2019), meningkatnya partisipasi masyarakat memiliki kegunaan dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan oleh kondisi masyarakat serta kondisi wilayahnya.

Menurut Pasaribu dalam Tawai & Yusuf (2017), konsep partisipasi merupakan sumbangan, perhatian dan keikutsertaan yang diberikan oleh kelompok atau individu yang berpartisipasi dalam konteks ini yaitu masyarakat. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan akses masyarakat di dalam proses kontribusi perihal upaya pembangunan, pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil-hasil partisipasi dalam pembangunan. Dua bentuk partisipasi yang digambarkan oleh Heller dalam Sutomo (2020), yaitu (1) partisipasi *grass root* yaitu partisipasi yang menggambarkan pergerakan sosial dan organisasi yang di inisiasi oleh masyarakat dengan memilih tujuan serta metode mereka sendiri dan (2) partisipasi resmi (*government mandatet*) di mana partisipasi masyarakat berada di lingkup keperluan yang sah guna memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyuarakan masukan ke dalam pengoperasian kebijakan pemerintahan.

Pelestarian ekosistem mangrove menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan hidup berbagai spesies dan keseimbangan lingkungan. Salah satu langkah konkret dalam konservasi ini adalah melalui program rehabilitasi, khususnya penanaman kembali mangrove yang rusak atau hilang. Rehabilitasi mangrove bertujuan tidak hanya untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti abrasi dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil Pra-riset tanggal 13 Desember 2024 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menurut saudara Faisal selaku sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Lampung telah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2016 hingga 2022, dengan luas area yang direhabilitasi terus meningkat. Program ini mencakup upaya penanaman mangrove di

berbagai wilayah pesisir yang terdampak degradasi, data tersebut terlampir sebagai berikut:

Tabel 1. Data Luas Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Lampung

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Lokasi	Estimasi Luas (Ha)
1.	2016	RHL Mangrove	UPTD KPH Gunung Balak	13
2.	2017	RHL Mangrove	UPTD KPH Gunung Balak	120
3.	2018	RHL Mangrove	UPTD KPH Gunung Balak	25
4.	2019	RHL Mangrove	UPTD KPH Gunung Balak	25
			UPTD KPH Pesawaran	99
			UPTD KPH Gunung Balak	120
5.	2020	RHL Mangrove	UPTD KPH Way Pisang	120
			UPTD KPH Tahura WAR	46
			UPTD KPH Way Pisang	120
6.	2022	Rehabilitasi Mangrove	Lampung Timur	4
			Pesawaran	3

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024

Tabel di atas menyajikan data mengenai luas rehabilitasi mangrove di Provinsi Lampung selama periode tahun 2016 hingga tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove sebagian besar terfokus di UPTD KPH Gunung Balak. Jenis kegiatan yang dilakukan umumnya adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mangrove. Luas area yang di rehabilitasi bervariasi setiap tahunnya, dengan total luas rehabilitasi mencapai ratusan hektar. Selain di Gunung Balak, kegiatan rehabilitasi juga dilakukan di beberapa lokasi lain seperti UPTD KPH Pesawaran, UPTD KPH Way Pisang, dan UPTD KPH Tahura WAR.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan mangrove melalui rehabilitasi mangrove menjadi bagian krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Mengutip pendapat Setyawan dan Winarno dalam Eddy dkk., (2017), terdapat sebesar 756.183 Ha berdasarkan luasan potensi habitat mangrove di tahun 2021, dalam hal ini terdapat kesesuaian habitat hidup mangrove namun tidak terdapat vegetasi mangrove dikarenakan adanya fenomena area terabrasi, mangrove terabrasi, lahan terbuka, tanah timbul dan tambak. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dyah Murtiningsih dalam siaran pers Nomor: SP.446/HUMAS/PPIP/HMS.3/12/2023 dalam Masagus (2023), menyatakan bahwa rehabilitasi mangrove baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan mencapai 6.010 ha di tahun 2023. Capaian tersebut berasal dari berbagai pembiayaan serta berbagai skema, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swadaya masyarakat dan swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Damsir dkk. (2023) memberikan gambaran terkait luas ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total luas mangrove yang ada yaitu 9.054,9 hektare yang terdiri dari kelas kerapatan jarang seluas 176,3 ha, kelas kerapatan sedang seluas 358,6 ha, dan kelas kerapatan lebat seluas 8.520 ha. Kabupaten Lampung Timur memiliki tutupan hutan mangrove yang terbagi dalam tiga kelas kerapatan, yaitu jarang, sedang, dan lebat dengan total luas 2.595,2 Ha. Luas masing-masing kelas tersebut adalah sebagai berikut: kelas kerapatan jarang seluas 49.48 ha, kelas kerapatan sedang seluas 74,88 ha, dan kelas kerapatan lebat seluas 2.470.87 ha. Kondisi ekosistem mangrove di Lampung Timur secara umum masih tergolong baik, ditandai oleh dominasi mangrove dengan kerapatan lebat. Namun, adanya mangrove dengan kelas kerapatan yang lebih rendah mengindikasikan adanya ancaman degradasi akibat konversi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim.

Tabel 2. Luas Ekosistem Mangrove di Kecamatan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Bandar Lampung	Teluk Betung Selatan	9
		Teluk Betung Timur	6,5
		Katibung	1,4
		Bakauheni	91,3
2	Lampung Selatan	Kalianda	48
		Ketapang	333,7
		Rajabasa	18,9
		Sragi	25,2
3	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	2.104,4
		Pasir Sakti	490,9
		Marga Punduh	209,7
4	Pesawaran	Padang Cermin	457,3
		Punduh Pepada	117,0
		Pematang Sawa	4,8
5	Tanggamus	Semaka	94,5
		Wonosobo	8,5
		Dente Teladas	2.047,5
6	Tulang Bawang	Gedung Meneng	181,5
		Rawajitu Selatan	1.968,1
		Rawajitu Timur	830,5

Sumber: Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, 2023

Tabel 2 menunjukkan data luas kecamatan dalam beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Lampung, meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, dan Tulang Bawang. Luas kecamatan bervariasi signifikan, dengan kecamatan terbesar adalah Labuhan Maringgai di Lampung Timur (2.104,4 Ha), sedangkan yang terkecil adalah Katibung di Lampung Selatan (1,4 Ha).

Penelitian mengenai partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Lampung Timur, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks administrasi negara. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama

dalam penerapan prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dalam administrasi negara, keterlibatan masyarakat lokal, seperti KTH, menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pengelolaan hutan mangrove, sebagai bagian dari sumber daya alam strategis, menuntut adanya integrasi antara kebijakan negara dan inisiatif masyarakat agar rehabilitasi dan pelestarian lingkungan berjalan lebih optimal.

Dalam konteks ini partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan pilar utama dalam keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam Permen LHK Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan ialah kelompok masyarakat Indonesia yang secara mandiri mengelola usaha di sektor kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung. Sebagai komunitas yang beroperasi langsung di kawasan hutan, dilansir dalam PATTIRO (2023) KTH memiliki potensi besar untuk menjalankan program rehabilitasi ekosistem secara efektif. Pendekatan partisipasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam, tetapi juga mendorong rasa memiliki terhadap keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan data Pra-riset yang di nyatakan oleh saudara Supri (Koordinator Penyuluh KPH Gunung Balak) menyatakan bahwa UPTD Gunung Balak telah melaksanakan pembinaan KTH di Lampung Timur sebagai langkah konkret dalam mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove. Kelompok tersebut menjadi aktor utama dalam implementasi program rehabilitasi yang berbasis partisipasi masyarakat. Dengan fokus pada pengelolaan kawasan hutan di wilayah pesisir, KTH tidak hanya berperan dalam pemulihan ekosistem yang terdampak abrasi dan konversi lahan, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Untuk memahami lebih jauh peran dan distribusi KTH yang terlibat dalam rehabilitasi mangrove, data berikut memberikan gambaran mengenai lokasi, tahun terbentuk, dan status pengelolaan masing-masing

kelompok.

Tabel 3. KTH yang Berfokus pada Rehabilitasi Mangrove

No.	KTH	Desa	Kecamatan	Tahun Terbentuk	Status KTH
1	Wane Karya Lestari	Karya Tani	Labuhan Maringgai	2023	Pemula
2	Karya Muda Lestari	Karya Makmur	Labuhan Maringgai	2020	Pemula
3	Mutiara Baru	Karya Makmur	Labuhan Maringgai	2017	Pemula
4	Muara Alam Lestari	Labuhan Ratu	Pasir Sakti	2020	Pemula
5	Mutiara Hijau	Purworejo	Pasir Sakti	2016	Madya

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024

Tabel 3 memuat informasi tentang 5 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berfokus pada rehabilitasi mangrove di bawah pembinaan UPTD KPH Gunung aryaitu Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai, dengan rincian 2 KTH berada di Pasir Sakti dan 3 KTH di Labuhan Maringgai. Sebagian besar kelompok masih berstatus "Pemula," yang mencerminkan mereka berada dalam tahap awal pembinaan. Namun, terdapat kelompok yang telah mencapai status "Madya," yaitu Mutiara Hijau di Pasir, menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan hutan dan rehabilitasi mangrove. Tabel ini memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat lokal melalui KTH dalam mendukung program rehabilitasi mangrove sebagai langkah strategis untuk mengatasi abrasi, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove di Lampung Timur.

Mengutip pendapat Marschke dan Berkes dalam Siahaya dkk (2016), metode pengelolaan berbasis masyarakat seperti pengembangan kelembagaan, uji coba, pengorganisasian secara swadaya, pembelajaran sosial dan elaborasi pengetahuan dapat membuat praktik lebih lestari dari munculnya fenomena praktik yang tidak lestari. Penerapan partisipasi masyarakat dapat mendukung upaya pengelolaan mangrove berjalan optimal. Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove menjadi salah satu bagian pengelolaan mangrove guna keberlanjutan ekosistem pesisir. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat

mengenai pengelolaan mangrove menjadi penentu sejauh mana masyarakat terlibat dalam upaya rehabilitasi tersebut. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan terhadap peran mangrove dalam menjaga ekosistem pesisir dan lingkungan di sekitarnya mendorong pengelolaan yang tidak berkelanjutan (Masâ, Subagio, & Jubaedah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan otonomi individu serta kelompok dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk turut serta dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi dan harapan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan mangrove. Keterlibatan suatu kelompok dalam menjaga sumber daya alam ini akan membantu melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan lebih lanjut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kabupaten Lampung Timur).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi KTH dalam rehabilitasi mangrove di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai?
2. Apakah terdapat perbedaan partisipasi KTH antara Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Lampung Timur dalam kegiatan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu upaya menekan permasalahan yang ada.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan partisipasi pada KTH antara Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca mengenai tingkat keterlibatan KTH di Kabupaten Lampung Timur dalam rehabilitasi mangrove dan memperkaya literatur mengenai studi kebijakan kehutanan terkait dengan pembangunan lingkungan berbasis masyarakat. Manfaat lainnya dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak terkait (*stakeholder*) dalam upaya meningkatkan efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan pada pengelolaan hutan mangrove, dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi KTH tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah peneliti terdahulu yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Fokus Penelitian
1	Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove Petengoran di Desa Gebang (Ramadan, Qurniati, & Kaskoyo, 2023)	Teori Arnstein (1969) & Teori Cohen dan Uphoff, (1979) dan menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa dukungan eksternal dan manfaat yang diperoleh masyarakat mendorong partisipasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah.	Fokus penelitian tersebut mengenai Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove membahas faktor eksternal dan internal dalam penelitian tersebut
2	Tingkat partisipasi masyarakat dan analisis aktor pada rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong, kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Fatimatuzzahroh, Hadi, & Purnaweni, 2021)	Sherry R. Arnstein: Tangga Partisipasi (1969) David Wilcox: Panduan untuk Partisipasi yang Efektif (1994) dengan metode kualitatif	Analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong menunjukkan bahwa masyarakat telah mencapai tingkat pemberdayaan tertinggi, yaitu tahap 'citizen power'. Hal ini ditandai dengan peran sentral Kelompok Tani Pantai Lestari dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat.	Penelitian ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dan peran aktor dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove.

No	Judul Penelitian	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Fokus Penelitian
3	Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat) (Gumilar, 2018)	Arnstein (1969), menggunakan metode kuantitatif	Masyarakat memahami bahwa kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Mereka juga menyadari pentingnya mangrove bagi lingkungan pesisir. Namun, partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian mangrove masih rendah dan bersifat formal. Untuk itu, perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat agar mereka memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan mangrove..	Penelitian ini berfokus pada persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove di Indramayu. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran manusia sebagai penyebab utama kerusakan ekosistem mangrove.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, meskipun terdapat persamaan dalam penggunaan Teori Arnstein (1969). Pertama, fokus penelitian ini secara khusus meneliti partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rehabilitasi hutan mangrove di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya, sehingga memberikan analisis mendalam tentang dinamika partisipasi di masing-masing lokasi. Penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat partisipasi KTH dalam rehabilitasi mangrove dengan menggunakan skala Likert, yang memberikan hasil yang lebih tegas dan jelas mengenai tingkat keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove,

2.2 Tinjauan Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Pidarta dalam Hutagalung (2022) memberikan pemahaman mengenai partisipasi sebagai keterlibatan individu yang bersifat menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam suatu kegiatan. Partisipasi Menurut Tawai & Yusuf (2017) dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan aktif warga, baik secara individu maupun kolektif, dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat serta dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Partisipasi yang optimal menuntut komitmen penuh dari individu atau kelompok untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama serta kesediaan untuk menanggung segala konsekuensi dari keterlibatan tersebut.

Menurut Davis dan Newstrom dalam Wahyuni (2019) Partisipasi merupakan suatu proses keterlibatan aktif individu dalam kelompok yang tidak hanya melibatkan tindakan fisik, namun juga melibatkan aspek kognitif dan afektif. Individu yang berpartisipasi tidak hanya memberikan kontribusi, tetapi juga merasa memiliki keterikatan emosional terhadap tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Pandangan Cohen dan Uphoff semakin memperkuat hal ini dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Notoatmodjo dalam Hutagalung (2022) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat melibatkan kontribusi multidimensi. Selain kontribusi finansial, partisipasi juga menuntut keterlibatan aktif individu dalam bentuk sumbangan tenaga, pemikiran, dan sumber daya fisik lainnya. Dalam hal tersebut muncul sebuah konsep 4M yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda yang menunjang partisipasi/kegiatan), dan *mind* (gagasan atau ide) sering digunakan untuk menggambarkan keragaman bentuk kontribusi dalam partisipasi masyarakat. Menurut

Revida dkk (2021) dalam pelaksanaan partisipasi meliputi: kegiatan administrasi, menggerakkan sumber daya, dana, koordinasi dan penjabaran program.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partisipasi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Partisipasi yang optimal membutuhkan komitmen dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul dari keterlibatan tersebut, serta di dalamnya termasuk kegiatan seperti administrasi, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi program.

2.2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Effendi dalam Pojo dkk (2020), partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam suatu program atau kegiatan yang diinisiasi oleh pihak eksternal, di mana masyarakat berada dalam posisi yang lebih rendah atau bergantung. Sebaliknya, partisipasi horizontal merujuk pada interaksi dan keterlibatan antar anggota masyarakat dalam suatu komunitas, yang didasarkan pada kesetaraan dan kemitraan. Menurut Keith Davis dalam Tawai & Yusuf (2017), bentuk partisipasi dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
2. Konsultasi dalam bentuk jasa
3. Pelaksanaan proyek pembangunan yang sepenuhnya diinisiasi dan dibiayai oleh masyarakat setempat, melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif seperti rapat komunitas atau kecamatan, merupakan wujud nyata dari semangat kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
4. Pendirian proyek yang mengandalkan sumbangan dari pihak ketiga merupakan salah satu *Model* pendanaan alternatif yang dapat

melengkapi sumber daya pemerintah.

5. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya terbatas pada kontribusi finansial, tetapi juga mencakup sumbangan tenaga kerja dari para ahli lokal.
6. Aksi masa
7. Mengadakan kegiatan di tingkat kecamatan secara swadaya
8. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonomi.

Menurut Saputra (2019), partisipasi di klasifikasikan ke dalam 3 bentuk yaitu:

1. Partisipasi Tenaga
Keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan dengan memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, baik secara fisik maupun mental. Ini menunjukkan komitmen individu terhadap tujuan bersama berupa kerja bakti, gotong royong, atau membantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Partisipasi Uang/Harta Benda
Kontribusi finansial merupakan salah satu bentuk partisipasi yang umum diberikan oleh individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, sosial, maupun kemanusiaan. Bentuk partisipasi ini umumnya berupa sumbangan uang tunai, bahan makanan, peralatan, atau bentuk aset lainnya yang dapat mendukung tercapainya tujuan kegiatan tersebut.
3. Partisipasi Keterampilan/Kemahiran
Partisipasi dengan menggunakan keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh anggota untuk kepentingan kegiatan agar tercapai tujuan bersama secara optimal.

Menurut Ndara dalam Hutagalung (2022), bentuk partisipasi meliputi:

1. Partisipasi sebagai inisiator perubahan sosial. Keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam membentuk jaringan sosial dan membangun relasi yang dapat memicu terjadinya perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dalam menerima, menganalisis, dan merespons informasi yang relevan dengan isu-isu pembangunan, serta memberikan masukan dan pendapat.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan aktif dalam merumuskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan arah dan prioritas pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di lapangan, baik secara individu maupun kelompok.
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Keterlibatan aktif dalam memanfaatkan hasil pembangunan, merawat infrastruktur yang telah dibangun, serta mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Keterlibatan aktif dalam menilai efektivitas dan keberhasilan program pembangunan, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Keenam bentuk partisipasi di atas menggambarkan spektrum yang luas dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Mulai dari tahap awal sebagai inisiator perubahan, hingga tahap akhir dalam mengevaluasi hasil pembangunan, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.2.3 Model Partisipasi Masyarakat

Menurut Chambers dalam Kumendong dkk (2019), berdasarkan *permodelannya*, masyarakat dalam upaya partisipasi di bedakan menjadi beberapa tingkatan. Menurut Arnstein yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dibedakan menjadi 8 tingkatan. Menurut Kenji dan

Greenwood membagi jenjang partisipasi masyarakat menjadi 5 jenjang, Wilcox membagi menjadi 5 jenjang dan Oakley membagi partisipasi masyarakat menjadi 5 tingkatan.

Hierarki partisipasi masyarakat mengilustrasikan fleksibilitas kata 'partisipasi' yang dapat diaplikasikan dalam beragam aktivitas dan relasi sosial. Lebih jauh, hierarki ini menyiratkan bahwa setiap *Model* partisipasi secara fundamental berkaitan dengan dinamika kekuasaan. Implikasinya, hal ini berpotensi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan mendorong transformasi perilaku menuju arah yang lebih positif.

Menurut pernyataan Kanji & Greenwood (2001), terdapat 5 tingkat partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dikategorikan menjadi lima jenjang yang didasarkan pada besarnya wewenang yang diberikan kepada masyarakat. Skema klasifikasi ini disusun dari tingkat partisipasi yang paling tinggi hingga yang paling rendah adalah sebagai berikut:

1. *Compliance* (kepatuhan)

Pada tingkat ini, masyarakat hanya sekedar mengikuti instruksi yang diberikan oleh pihak luar tanpa adanya ruang untuk memberikan masukan atau pendapat. Tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dan mereka lebih berperan sebagai objek daripada subjek dalam proyek.

2. *Consultation* (konsultasi)

Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak luar. Partisipasi masyarakat masih terbatas, dan mereka lebih berperan sebagai penyedia informasi.

3. *Cooperation* (kerja sama)

Masyarakat dan pihak luar bekerja sama dalam menentukan prioritas dan merencanakan proyek. Namun, kendali atas proses pelaksanaan proyek masih berada di tangan pihak luar. Partisipasi

masyarakat mulai meningkat, namun masih dalam batasan-batasan tertentu.

4. *Co-learning* (pembelajaran bersama)

Pada tingkat ini, terjadi pertukaran pengetahuan dan pemahaman antara masyarakat lokal dan pihak luar. Keputusan diambil secara bersama-sama melalui proses dialog dan negosiasi. Partisipasi masyarakat sangat tinggi, dan mereka memiliki peran yang setara dengan pihak luar.

5. *Collective action* (aksi kolektif)

Pada tingkat ini, Masyarakat lokal mengambil inisiatif untuk mengelola sumber daya dan lingkungan mereka secara mandiri, terlepas dari pengaruh pihak luar.

Oakley dalam Hutagalung (2022) membagi partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagai berikut.

1. Manipulasi (*manipulation*)

Bentuk partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dijadikan objek tanpa memiliki kuasa untuk menentukan apa pun. Informasi yang diberikan cenderung bias dan bertujuan untuk mengarahkan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.

2. Konsultasi (*consultation*)

Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau saran. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang berwenang. Sering kali, masukan masyarakat tidak dipertimbangkan secara serius atau hanya digunakan sebagai formalitas.

3. Pembentukan konsensus (*consensus building*)

Melibatkan interaksi antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun demikian, sering kali terdapat dominasi dari kelompok tertentu sehingga tidak semua suara terwakili. Individu cenderung diam atau setuju secara pasif demi

menjaga harmoni kelompok.

4. Pengambilan keputusan (*decision making*)

Menandai tahap di mana keputusan diambil secara kolektif berdasarkan kesepakatan bersama. Proses negosiasi yang terjadi mencerminkan adanya perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Pada tahap ini, rasa tanggung jawab untuk menghasilkan keputusan yang terbaik menjadi landasan utama.

5. Pengambilan risiko (*risk-taking*)

Tahap lanjutan dari pengambilan keputusan, di mana masyarakat tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut, baik itu keuntungan maupun kerugian. Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting pada tahap ini karena setiap individu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

6. Kemitraan (*partnership*)

Tahap di mana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara setara. Tanggung jawab dibagi secara merata di antara semua anggota.

7. Manajemen mandiri (*self management*)

Pada tahap ini, masyarakat memiliki otonomi penuh dalam mengelola dan mengembangkan suatu program atau proyek. Masyarakat belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan mereka.

Menurut Wilcox dalam Hutagalung (2022) terdapat lima tingkatan partisipasi yaitu:

1. Penyampaian informasi (*information*)

Tingkat partisipasi paling dasar di mana masyarakat hanya diberikan informasi terkait suatu program atau kegiatan tanpa adanya kesempatan untuk memberikan masukan atau terlibat lebih lanjut.

2. Konsultasi (*consultation*)

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait suatu program atau kegiatan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang berwenang. Partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat pasif.

3. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*)

Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masukan dan ide-ide masyarakat dipertimbangkan secara serius dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau tindakan.

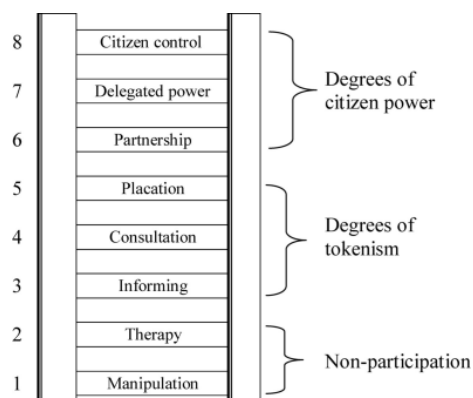
4. Pelaksanaan bersama (*acting together*)

Partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan diri secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat menjadi mitra kerja dalam mewujudkan tujuan bersama.

5. Dukungan independen (*sporting independent community interest*)

Masyarakat memberikan dukungan secara mandiri terhadap suatu kegiatan, baik dalam bentuk finansial, pengetahuan, atau sumber daya lainnya. Dukungan ini bersifat sukarela dan tidak selalu terikat dengan institusi formal.

Menurut Arnstein (1969) dalam Lawson (2025) tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan secara partisipasi dibagi menjadi delapan tahap yang dikelompokkan dalam tiga tingkatan.



Gambar 2. Arnstein 1969

Sumber: SearchGate, 2019

Tingkat pertama yaitu *non-participiipation* terdiri dari manipulasi dan

terapi; tingkat kedua yaitu *degress of tokenism* terdiri dari menginformasikan, konsultasi, dan menenangkan; dan tingkat ketiga *degress of citizen power* terdiri dari kemitraan, kekuasaan didelegasikan dan kontrol warga negara. Teori ini dikenal sebagai "*The Ladder of Partisipation*". Secara garis besar, teori ini menggambarkan spektrum partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat yang sangat pasif hingga tingkat di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan. Tangga Partisipasi menurut Arnstein yaitu sebagai berikut:

1. Manipulasi (*manipulation*)

Tingkat manipulasi menandai ketidakseimbangan kekuasaan yang ekstrem dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat pada tingkat ini hanya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi keputusan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang. Partisipasi yang terjadi pada tingkat ini tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi yang berarti.

2. Terapi (*therapy*)

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih merupakan formalitas daripada sebuah proses yang melibatkan masyarakat secara substansial. Pihak berwenang hanya sekedar melibatkan masyarakat untuk menghindari konflik, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut menentukan arah pembangunan.

3. Menginformasikan (*informing*)

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat sebatas pada penerimaan informasi secara pasif dari pihak berwenang. Masyarakat tidak memiliki peluang untuk memberikan masukan atau bernegosiasi terkait keputusan yang telah diambil.

4. Konsultasi (*consultation*)

Pada tahap konsultasi, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas. Saran dan pendapat masyarakat meskipun didengar, belum tentu dipertimbangkan secara serius. Pihak berwenang cenderung melihat masyarakat sebagai sekumpulan data statistik, sehingga partisipasi masyarakat hanya diukur dari kuantitas

kehadiran atau kelengkapan data.

5. Menenangkan (*placation*)

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Meskipun demikian, pengaruh masyarakat masih terbatas, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang. Masukan yang diberikan masyarakat belum tentu diimplementasikan secara penuh.

6. Kemitraan (*partnership*)

Pada tahap ini, kekuasaan dibagi melalui proses negosiasi yang setara antara masyarakat dan pihak berwenang. Keputusan diambil secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan timbal balik. Aturan yang berlaku bersifat dinamis dan dapat berubah melalui mekanisme negosiasi.

7. Kekuasaan didelegasikan (*delegated power*)

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat tinggi. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengontrol pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat di mana masyarakat berperan sebagai pengawas.

8. Kontrol warga negara (*citizen control*)

Pada tahap ini, masyarakat telah diberikan otonomi penuh untuk mengelola program dan lembaga yang dipercayakan kepada mereka. Masyarakat memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan dan menjalankan aspek-aspek manajemen yang terkait.

Penggunaan Teori Arnstein (1969) dalam penelitian ini relevan dikarenakan teori ini menawarkan kerangka konseptual yang jelas untuk memahami berbagai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Teori ini membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga negara, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana masyarakat

terlibat dalam proses rehabilitasi hutan mangrove. Dengan mengadopsi teori ini, penelitian ini dapat mengevaluasi tidak hanya seberapa besar partisipasi KTH, tetapi juga kualitas dan kedalaman keterlibatan mereka dalam pengelolaan mangrove. Selain itu, Teori Arnstein memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, yang sangat relevan dalam konteks rehabilitasi mangrove, di mana kolaborasi antara kedua pihak sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan.

2.3 Rehabilitasi Mangrove

Meskipun terdapat berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli mengenai istilah mangrove, pada dasarnya para ahli tersebut merujuk pada pengertian yang sama. Berdasarkan Tomlinson (1986) dan Wightman (1989), sebagaimana dikutip oleh Saru (2019), mendefinisikan mangrove sebagai suatu komunitas tumbuhan yang menempati daerah pasang surut yang berfungsi sebagai pelindung hempasan gelombang dan angin laut yang kuat.

Menurut Arief dikutip dalam Brahim (2021), mangrove merupakan penyebutan yang secara historis disebut sebagai “*vloedboh*”, kemudian lebih dikenal sebagai ekosistem “payau” dikarenakan karakteristik habitatnya yang mengandung kadar garam di antara 0,5 hingga 30 bagian per seribu. Selain itu, ekosistem ini juga sering disebut hutan pasang surut mengingat lokasinya yang secara berkala terpengaruh oleh pasang surut air laut. Mengingat dominasi pohon bakau dalam ekosistem ini, maka kawasan mangrove sering kali juga disinonimkan dengan kawasan bakau.

Menurut Pradini dalam Rizqi dkk (2023), ekosistem mangrove merupakan suatu sistem ekologis unik yang khas ditemukan di wilayah pesisir. Di dalam ekosistem ini, terjadi interaksi timbal balik yang kompleks antara komponen abiotik seperti senyawa anorganik, senyawa organik, serta fluktuasi pasang surut dan salinitas, dengan komponen biotik seperti produsen dan konsumen tingkat tinggi. Ekosistem mangrove ini memiliki peran yang sangat krusial

dalam menunjang keberlangsungan hidup berbagai organisme, sekaligus mencerminkan hubungan simbiosis mutualisme yang harmonis antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pengertian mangrove tersebut disimpulkan bahwa Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan yang khas ditemukan di daerah pasang surut, terutama di muara sungai dan daerah pesisir yang terlindung. Tumbuhan yang hidup di kawasan ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang unik, seperti tanah berlumpur, kadar garam tinggi, dan pengaruh pasang surut air laut.

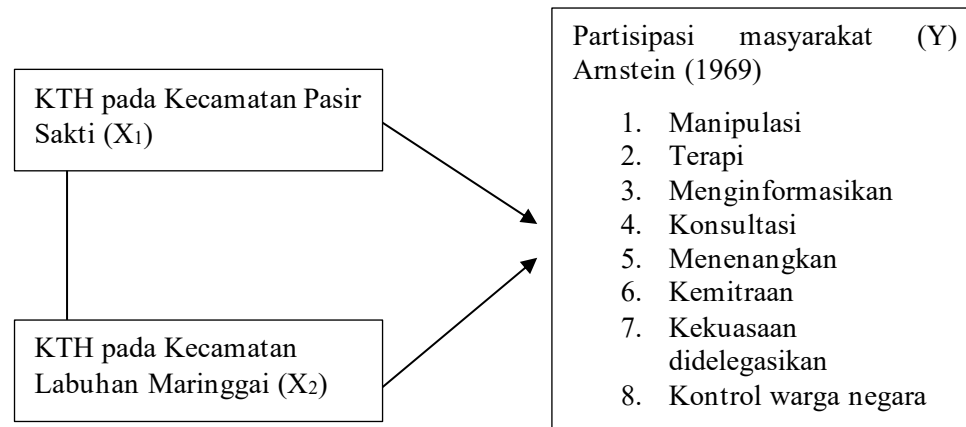
Ekosistem mangrove, sebagai suatu sistem ekologis yang khas di wilayah peralihan darat dan laut, memiliki peranan krusial dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial, mangrove memberikan kontribusi yang signifikan. Keberhasilan pengelolaan mangrove sangat bergantung pada penerapan strategi yang tepat untuk memastikan fungsi optimal dan keberlanjutan ekosistem ini. Dikutip dalam Kustanti (2018) rehabilitasi mangrove merupakan upaya pemulihan dan pengembalian fungsi ekosistem mangrove yang telah terdegradasi, menjadi kunci dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Mengingat posisi mangrove sebagai penyangga antara daratan dan lautan, pengelolaan mangrove melibatkan berbagai kepentingan, baik lingkungan maupun sosial ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brahim (2021) terdapat upaya pemerintah dalam mengelola hutan mangrove telah melahirkan berbagai kebijakan, termasuk strategi nasional pengelolaan mangrove dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi dan memanfaatkan hutan mangrove secara lestari. Dalam konteks rehabilitasi mangrove, strategi pokok seperti perlindungan proses ekologi dan perencanaan tata ruang menjadi sangat penting. Namun, keberhasilan upaya rehabilitasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan rehabilitasi menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Dikutip dalam Kustanti (2018) perencanaan pengelolaan mangrove yang komprehensif menjadi suatu keharusan. Perencanaan ini harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, di mana segala potensi mangrove, baik dalam hal produksi maupun jasa lingkungan, dapat dioptimalkan secara bijaksana. Rehabilitasi dalam konteks ini mencakup serangkaian kegiatan untuk memulihkan kondisi mangrove yang rusak, seperti penanaman kembali mangrove, pengendalian erosi, dan perbaikan kualitas air. Tujuan akhir dari rehabilitasi adalah mengembalikan mangrove pada kondisi yang sehat dan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan.

Hutan mangrove, sebagai ekosistem pesisir yang krusial, memiliki peran esensial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan mangrove menjadi imperatif hukum. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas mengatur upaya komprehensif untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan. Dalam rangka melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup yang rusak, UU PPLH mengamanatkan pelaksanaan rehabilitasi. Pasal 54 ayat (2) huruf c UU PPLH secara spesifik mendefinisikan rehabilitasi sebagai upaya aktif untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, termasuk melalui pencegahan kerusakan lahan dan perbaikan ekosistem. Dengan demikian, rehabilitasi mangrove merupakan implementasi konkret dari amanat UU PPLH untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0) : Tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi KTH dalam rehabilitasi mangrove antara Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai.
2. Hipotesis Alternatif (H_1) : Ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat partisipasi KTH dalam rehabilitasi mangrove antara Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik maupun kondisi yang menjadi fokus kajian. Selain mengumpulkan data, penelitian ini juga melibatkan analisis mendalam dan interpretasi data untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

Pendekatan kuantitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena memberikan keunggulan dalam analisis statistik yang kuat. Metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap populasi KTH di Kabupaten Lampung Timur yang terlibat dalam upaya rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Selain itu, data yang diukur secara numerik memungkinkan analisis yang lebih objektif dan terukur. Metode kuantitatif melibatkan pengumpulan data dari sampel yang dipilih secara acak dari populasi yang lebih besar, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi tersebut (Sugiyono, 2022).

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid, peneliti perlu merumuskan definisi konseptual dan operasional variabel secara eksplisit. Definisi-definisi ini akan menjadi kerangka acuan yang jelas dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, sehingga meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil penelitian. Menurut Unaradjan (2019), definisi konseptual adalah pemahaman yang komprehensif terhadap konsep penelitian akan

memperlancar proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Sedangkan definisi operasional adalah suatu proses penjabaran rinci terhadap variabel penelitian, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang variabel tersebut Mustafa dkk (2022). Proses ini melibatkan penentuan makna yang spesifik, pendefinisian tindakan yang relevan, serta penetapan prosedur pengukuran yang dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang objektif. Adapun definisi Konseptual dan definisi operasional dari variabel pada penelitian ini adalah sebagaimana disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Pernyataan	Kode	Item jawaban
1	Partisipasi masyarakat	Menurut Revida dkk (2021) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan/keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.	Tingkat partisipasi KTH yang diukur berdasarkan berbagai aspek seperti, manipulasi, terapi, menginformasikan, konsultasi, menenangkan, kemitraan, kekuasaan didelegasikan, dan kontrol warga negara.	Manipulasi	a. Saya merasa bahwa informasi yang diberikan kepada saya untuk kepentingan organisasi	P1	Skala Likert
					b. Saya merasa bahwa keputusan yang diambil tidak melibatkan masukan dari saya	P2	
					c. Saya merasa bahwa partisipasi saya tidak memiliki dampak pada hasil akhir keputusan organisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove	P3	
				Terapi	a. Saya merasa bahwa saya diundang untuk memberikan pendapat tanpa ada tindak lanjut	P4	
					b. Saya merasa di libatkan hanya untuk menghindari konflik	P5	
					c. Saya merasa bahwa partisipasi saya hanya bersifat simbolis	P6	
				Menginformasikan	a. Saya jarang di libatkan dalam setiap pertemuan dalam pengambilan keputusan	P7	
					b. Saya merasa saya tidak memiliki kesempatan bernegosiasi terkait keputusan yang diambil	P8	
					c. Saya merasa bahwa saya tidak	P9	

		memiliki kesempatan dalam memberikan masukan	
Konsultasi	a.	Saya kerap kali diundang untuk memberikan pendapat dalam pertemuan	P10
	b.	Saya merasa bahwa pendapat saya didengar, meskipun tidak selalu diimplementasikan	P11
	c.	Saya merasa bahwa ada upaya untuk mengumpulkan masukan dari anggota dalam kegiatan rehabilitasi mangrove	P12
Menenangkan	a.	Saya diberikan kesempatan dalam memberikan masukan dan saran	P13
	b.	Terdapat rasa saling menghormati pendapat antara saya dengan pengambil keputusan	P14
	c.	Saya merasa bahwa saya memiliki peran yang setara dalam proses pengambilan keputusan	P15
Kemitraan	a.	Saya bekerja sama dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan wilayah penanaman mangrove	P16
	b.	Saya merasa pengambilan	P17

		keputusan dilakukan secara negosiasi	
	c.	Saya merasa bahwa masukan saya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove	P18
Kekuasaan didelegasikan	a.	Saya merasa bahwa saya memiliki kontrol atas sumber daya yang digunakan dalam organisasi	P19
	b.	Saya merasa bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan keinginan saya dalam proses rehabilitasi mangrove di wilayah saya	P20
	c.	Saya merasa bahwa saya memiliki suara yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi	P21
Kontrol warga negara	a.	Saya merasa bahwa saya terlibat dalam semua aspek pengambilan keputusan mulai dari perencanaan hingga monitoring mangrove yang telah di rehabilitasi	P22
	b.	Saya merasa bahwa saya memiliki pengaruh penting terhadap arah organisasi	P23

-
- | | | |
|----|--|-----|
| c. | Selaku kelompok tani hutan saya memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan rehabilitasi mangrove di wilayah saya | P24 |
|----|--|-----|
-

Sumber: Diolah peneliti, 2025

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area spesifik yang dipilih sebagai fokus utama dalam suatu kajian ilmiah, di mana segala aktivitas pengumpulan data dan analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di KTH pada dua Kecamatan yaitu pada Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lokasi penelitian ini memiliki karakteristik khusus yang membuatnya menjadi tempat yang paling sesuai untuk mengkaji fenomena yang diteliti.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2022), populasi merupakan ruang lingkup penelitian yang mencakup seluruh elemen yang menjadi sasaran pengamatan dan analisis data, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh anggota KTH di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang berfokus pada rehabilitasi mangrove dengan populasi sebesar 197.

Tabel 6. Data Anggota KTH di Lampung Timur

No	Kecamatan	KTH	Anggota
1	Labuhan Maringgai	Wane Karya Lestari	71
2		Karya Muda Lestari	17
3		Mutiara Baru	70
4	Pasir Sakti	Muara Alam Lestari	21
5		Mutiara Hijau	18
		Jumlah	197

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2025

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Arikunto dalam Amin dkk (2023), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara cermat untuk mewakili karakteristik

keseluruhan populasi. Besarnya sampel dalam penelitian ditentukan melalui rumus Taro Yamane. Langkah awal yang krusial yaitu dengan menetapkan batas toleransi kesalahan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumus Taro Yamane sendiri digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan berdasarkan batas toleransi kesalahan yang telah ditentukan. Rumus Taro Yamane:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d² = Presisi/tingkat penyimpangan yang diinginkan adalah 5% (0,05)

$$n = \frac{197}{(197 \cdot 0,0025) + 1}$$

$$n = \frac{197}{1,4925}$$

$$n = 131,9 = 132$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari anggota KTH di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang berfokus pada rehabilitasi mangrove. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 132.

3.5 Tahap Pengumpulan Data

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan tahap sebagai berikut:

3.5.1 Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi dua jenis data, yaitu data primer yang bersifat asli dan dikumpulkan secara langsung untuk penelitian oleh peneliti, serta data sekunder yang telah ada sebelumnya dan diperoleh

dari sumber-sumber yang relevan. Data primer diperoleh melalui pengisian angket oleh responden, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung analisis.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa angket yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Angket merupakan alat pengumpul data penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi langsung dari responden melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (Sugiyono, 2022).

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yang termasuk dalam kategori ordinal. Menurut (Pradana & Mawardi, 2021), *skala likert* dirancang untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terkait fenomena sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, disediakan empat alternatif jawaban yang masing-masing memiliki skor sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Pengukuran

Keterangan	Jawaban	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
S	Setuju	3
SS	Sangat Setuju	4

Sumber: Pradana & Mawardi, 2021

Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengkategorian jawaban yaitu berdasarkan nilai rata-rata (*Mean*) menggunakan skala interval dengan menghitung panjang kelas interval berdasarkan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai skro tertinggi} - \text{Nilai skor terendah}}{\text{Banyak Kelas}} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Tabel 8. Daftar Interpretasi Skor Rata-rata dalam Variabel Penelitian

Arti	Angka
Sangat Baik	3,31 – 4,05
Baik	2,51 – 3,30
Tidak Baik	1,75 – 2,50
Sangat Tidak Baik	1,00 – 1,75

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas yang di kemukakan oleh Sugiyono dalam Rosita dkk (2021) merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengkonfirmasi sejauh mana suatu alat ukur telah dirancang dan berfungsi sesuai dengan tujuannya dalam mengukur variabel tertentu. Suatu instrumen kuesioner dapat dikategorikan valid apabila setiap butir pertanyaan di dalamnya mampu berfungsi sebagai indikator yang akurat untuk mengungkap variabel yang ingin diukur. Validitas suatu kuesioner secara empiris ditunjukkan oleh hasil nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel*, maka alat ukur tersebut di nyatakan valid.

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{hitung} : Koefisien Validitas

n : Jumlah Responden

X : Skor Variabel (Jawaban responden)

Y : Skor total dari Variabel (Jawaban responden)

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Partisipasi KTH

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0,376	0,361	Valid
P2	0,369	0,361	Valid
P3	0,421	0,361	Valid

Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P4	0,382	0,361	Valid
P5	0,506	0,361	Valid
P6	0,454	0,361	Valid
P7	0,368	0,361	Valid
P8	0,448	0,361	Valid
P9	0,433	0,361	Valid
P10	0,392	0,361	Valid
P11	0,438	0,361	Valid
P12	0,392	0,361	Valid
P13	0,455	0,361	Valid
P14	0,396	0,361	Valid
P15	0,380	0,361	Valid
P 16	0,471	0,361	Valid
P17	0,438	0,361	Valid
P18	0,562	0,361	Valid
P19	0,411	0,361	Valid
P20	0,426	0,361	Valid
P21	0,488	0,361	Valid
P22	0,646	0,361	Valid
P23	0,415	0,361	Valid
P24	0,481	0,361	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 8 Uji validitas pada variabel partisipasi KTH diketahui bahwa semua item pernyataan sebanyak 24 item yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga instrumen dikatakan valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan keajegan/ketetapan pengukuran. Uji reliabilitas merupakan prosedur statistik yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keandalan suatu instrumen penelitian dalam menghasilkan data. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2022), reliabilitas mengindikasikan seberapa jauh hasil pengukuran terhadap objek yang sama akan tetap sama ketika dilakukan pengukuran ulang. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* yang diperoleh melebihi ambang batas 0,70. Perhitungan koefisien reliabilitas ini mengacu pada rumus yang telah ditetapkan. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

α = Reliabilitas

k = Banyak butir pertanyaan

σt^2 = Variasi Total

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Variasi Butir

Tabel 10. Tabel Reliabilitas pada Variabel Partisipasi KTH

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
24	0,82	0,70	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 9, hasil uji reliabilitas pada variabel partisipasi KTH dengan sampel sebanyak 30 responden dan jumlah item sebanyak 24 pertanyaan, diperoleh *Cronbach's Alpha* untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan instrumen valid yang digunakan reliabel.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara objektif, tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak komputer yaitu *Microsoft Excel* dan *IMB SPSS gen 25*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelaksanaan langkah-langkah penelitian.

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah

nilai residual yang dihasilkan dari analisis regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan distribusi normal baku. Dalam pengujian menggunakan metode statistik, seperti uji *Kolmogorov-Smirnov*, data dianggap terdistribusi normal apabila nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $\geq 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tersebut dinyatakan tidak mengikuti distribusi normal (A. Hidayat, 2013).

3.8.2 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji normalitas, jika diketahui bahwa data tidak terdistribusi normal, maka digunakan metode alternatif yang sesuai yaitu dengan menggunakan *Uji Mann-Whitney U*. *Uji Mann-Whitney U*, yang juga dikenal sebagai *Wilcoxon Rank Sum Test*, merupakan metode analisis non-parametrik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga uji Independent T Test tidak dapat diterapkan (A. Hidayat, 2014). Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan nilai *Median* antara dua kelompok independen.

Dasar pengambilan keputusan terhadap *Uji Mann-Whitney U* yang dikutip dari (Fiana, Relmasira, & Hardini, 2019) yaitu:

1. Jika nilai *Asymp.Sig.* $< 0,05$, maka hipotesis H_0 di tolak, dan disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Jika nilai *Asymp.Sig.* $> 0,05$, maka hipotesis H_0 gagal ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik.

Dalam penelitian ini taraf signifikansi sebesar 5% digunakan sebagai batas probabilitas untuk menolak hipotesis nol dalam pengujian statistik. Sebagai konsekuensinya, taraf kepercayaan sebesar 95% ditetapkan sebagai tingkat keyakinan terhadap hasil pengujian tersebut. Dengan demikian, taraf kepercayaan sebesar 95% dianggap sebagai kebalikan dari taraf signifikansi 5%. Penetapan taraf kepercayaan ini menunjukkan bahwa kemungkinan kesalahan tipe I,

yaitu menolak hipotesis nol yang sebenarnya benar, dibatasi sebesar 5%. Oleh karena itu, keputusan pengujian hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi yang telah ditentukan, dan tingkat kepercayaan ini digunakan untuk menetapkan batas kritis dalam analisis statistik.

3.8.2 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini data mentah akan diolah dan dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Martias (2021) menyatakan bahwa penyajian data secara deskriptif dengan cara ukuran pemusatan (Tendensi Sentral) dibagi menjadi tiga buah ukuran, yaitu sebagai berikut:

1. *Mean* (Rata –Rata Hitung)

Mean merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data. Nilai *Mean* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan antara satu populasi dengan populasi lainnya. Berikut rumus untuk mencari mean pada data kelompok:

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = rata-rata

f_i = nilai frekuensi

X_i = nilai tengah

2. *Median*

Median merupakan nilai yang terletak di tengah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan berdasarkan nilai, sehingga membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. *Median* berfungsi sebagai salah satu teknik deskriptif untuk menjelaskan kelompok data berdasarkan nilai tengah, yang diperoleh dari

pengurutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berikut rumus guna mencari median pada data kelompok, menggunakan rumus berikut:

$$M_e = b + p \left(\frac{\frac{1}{2}n - f}{f} \right)$$

Keterangan:

b = batas bawah kelas median, ialah kelas dimana median terletak

p = panjang kelas median

n = banyak data

f = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median

f = frekuensi kelas medium

3. *Modus*

Modus adalah teknik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan kelompok data berdasarkan nilai yang paling sering muncul atau yang paling populer dalam kelompok tersebut. Untuk menghitung nilai modus pada data kelompok, dapat digunakan rumus sebagai berikut.

$$M_o = b + p \left(\frac{b_1}{b_1 + b_2} \right)$$

Keterangan:

M_o = modus

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak

p = panjang kelas interval

b_1 = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya

b_2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya.

Dalam perhitungan *Mean*, *Modus*, dan *Mean* akan menggunakan perangkat lunak IMB SPSS gen 25.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai secara umum berada dalam kategori “baik”, dengan rata-rata skor sebesar 2,89 dari 24 item pernyataan. Temuan ini menunjukkan adanya keterlibatan yang cukup kuat dalam berbagai tahapan kegiatan rehabilitasi hutan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan. Hal ini diperkuat oleh kecenderungan responden untuk menyatakan “setuju”, yang mencerminkan persepsi positif terhadap program yang dijalankan. Namun demikian, partisipasi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pengambilan keputusan strategis, konsistensi kehadiran dalam forum kelompok, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, terdapat variasi tingkat partisipasi antar kecamatan. Di Pasir Sakti, partisipasi tergolong sedang (rata-rata 65,88) dengan modus rendah (50,00), mengindikasikan adanya kelompok dengan keterlibatan di bawah rata-rata. Partisipasi di Kecamatan Labuhan Maringgai dikategorikan pada tingkat sedang, namun ditunjukkan pola yang lebih tinggi dan merata (rata-rata 70,21; *modus* 72,00), yang mencerminkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan menyeluruh.
2. Hasil uji *Mann-Whitney U* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) sebesar 0,133. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik

antara tingkat partisipasi KTH di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai. Meskipun secara deskriptif diketahui bahwa Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki rata-rata partisipasi yang lebih tinggi (70,21) dibandingkan dengan Kecamatan Pasir Sakti (65,88), perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, indikator manipulasi memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata 2,58, yang menandakan bahwa partisipasi anggota KTH masih berada pada tingkat *non-participation*, sebanyak 57,6% responden setuju dan 28,8% sangat setuju bahwa informasi yang diterima lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi daripada membangun dialog dua arah. Untuk memperbaiki kondisi ini, KTH perlu membangun mekanisme komunikasi dua arah, menyelenggarakan forum musyawarah rutin. Dengan demikian, partisipasi dapat bertransformasi dari sekadar formalitas menuju partisipasi sejati yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan mangrove.
2. Meskipun hasil uji menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara tingkat partisipasi KTH di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai, pengurus KTH dan pendamping lapangan (Penyuluh Kehutanan) disarankan untuk melakukan upaya peningkatan partisipasi anggota, khususnya di Kecamatan Pasir Sakti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiasari, D. (2023). Panjang Pantai RI Capai 108.000, Butuh Usaha Ekstra Biar Nggak Terkikis. Diambil 16 Desember 2024, dari Detik.com website: <https://www.detik.com/properti/berita/d-6875912/panjang-pantai-ri-capai-108-000-butuh-usaha-ekstra-biar-nggak-terkikis>
- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove (community participation in mangrove management). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41.
- Alimuddin, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang*.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31.
- Ardiana, M. N., & Agusta, I. (2018). Analisis Partisipasi Petani dalam Asuransi Pertanian. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 793–802. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.793-802>
- Baines-Johnson, E. L. (2018). Participation And Development; A Critical Assessment: Is Participation Vital For Development. *Journal of International Social Research*, 11(56), 111–116. <https://doi.org/10.17719/jisr.20185638982>
- Brahim, M. N. E. (2021). *Pelestarian Hutan Mangrove* (1 ed.). Bekasi: CV. Mitra Utama.
- Damsir, D., Ansyori, A., Yanto, Y., Erwanda, S., & Purwanto, B. (2023). Pemetaan Areal Mangrove Di Provinsi Lampung Menggunakan Citra Sentinel 2-A Dan Citra Satelit Google Earth. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 207–216. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i3.37>

- Dewi, S. E. P., & Lasso, A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Pariwisata di Desa Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jpt.69573>
- Ditjen PDASHL. (2021). Peluncuran Peta Mangrove Nasional 2021—Ditjen PDASRH KLHK. Diambil 28 November 2024, dari <https://pdasrh.menlhk.go.id/newsdetail.php?id=355-Peluncuran-Peta-Mangrove-Nasional-2021>
- Eddy, D. S., Mulyana, A., Dr. Moh. Rasyid Ridho, M. S., & Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M. S. (2017, Oktober 23). *Dampak Aktivitas Antropogenik Terhadap Degradasi Hutan Mangrove Di Indonesia*. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xd9cb>
- Erawati, I., & Mussadun. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung. *Ruang*, 1(1), 31–40.
- Fatimatuazzahroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Analisis Aktor Pada Rehabilitasi Mangrove Di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 257–269. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9420>
- Fiana, R. O., Relmasira, S. C., & Hardini, A. T. A. (2019). Perbedaan Penerapan Model Project Based Learning dan Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 4 SD. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 157–162.
- Gumilar, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat). *Sosiohumaniora*, 20(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14707>
- Hadi, A., Wahyuni, D., Safitri, N., Jannah, N. R., Rahmadin, M. G., & Febrianti, S. S. (2022). Rehabilitasi Lahan Mangrove Sebagai Strategi Mitigasi Bencana Alam di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 45–50. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i1.1285>
- Hidayat, A. (2013, Januari 23). Uji Normalitas dan Metode Perhitungan (Penjelasan Lengkap). Diambil 26 Juni 2025, dari Statistikian website: <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html>

- Hidayat, A. (2014, April 8). Penjelasan Uji Mann Whitney U Test—Lengkap. Diambil 29 Juni 2025, dari Statistikian website: <https://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test.html>
- Hidayat, M. T. (2013). Kritik Atas Pelibatan Publik Dalam Kebijakan Komunikasi Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(1), 114–131. <https://doi.org/10.22441/jvk.v12i1.376>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (1 ed.). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. (Malang).
- Kanji, N., & Greenwood, L. (2001). *Policy & Planning Processes*. Diambil dari <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/9095IIED.pdf>
- Kumendong, W. L., Kaawoan, J., & Rengkung, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Eksekutif, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Kustanti, A. (2018). *Manajemen Hutan Mangrove* (1 ed.). Bogor: PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Lawson. (2025). Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation” 1969. Dalam *Vanderbilt* (hlm. 10). Diambil dari <https://jstor.org/stable/community.33127599>
- Lestariningsih, S. P., Widiyastuti, T., & Dewantara, J. A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.31186/naturalis.10.1.16244>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40–59. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Masâ, M. Y. A., Subagio, A. A., & Jubaedah, I. (2021). Penyuluhan Pelestarian Mangrove Pada Kelompok Masyarakat Pengawas Pulau Lakkang Di Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 15(2), 227–245. <https://doi.org/10.33378/jppik.v15i2.251>
- Masagus. (2023). Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Hutan KLHK Tahun 2023—Ditjen PDASRH KLHK. Diambil 1 Oktober 2024, dari <https://pdasrh.menlhk.go.id/newsdetail.php?id=418-Kinerja-Direktorat-Jenderal-Pengelolaan-Daerah-Aliran-Sungai-dan-Rehabilitasi-Hutan-KLHK-Tahun-2023>

Mukhlis, A. M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar. *Universitas Hasanuddin*. Diambil dari <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4186/>

Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., & Lestariningsih, N. D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga. *Insight Mediatama*. Diambil dari <https://repository.insightmediatama.co.id/books/article/view/21>

Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, 3(1), 31–31. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i1.1119>

Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *Melanesia*, 1(2), 15–31. <https://doi.org/10.30862/jm.v1i2.811>

PATTIRO. (2023, November 2). Pelibatan Masyarakat Sebagai Kunci Efektivitas RHL. Diambil 29 November 2024, dari PATTIRO website: <https://pattiro.org/2023/11/pelibatan-masyarakat-sebagai-kunci-efektivitas-rhl/>

Podungge, D., Bempah, I., & Boekoesoe, Y. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove (Studi Kasus Hutan Mangrove Desa Langge Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara). *Agresia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1), 9–15. <https://doi.org/10.37046/agr.v5i1.11811>

Pojo, L. P., Safar, M. S., & Momo, A. H. (2020). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat). *Selami Ips*, 12(1), 20. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i1.10834>

Pradana, F. A. P., & Mawardi. (2021). Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Disiplin Menggunakan Skala Likert dalam Pembelajaran Tematik kelas IV SD. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1), 13–29. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1090>

- Pribadiningtyas, D. K., Said, A., & Rozikin, M. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 70–79.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Rahayu, P. S., Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2021). Partisipasi Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan Komunitas Manajemen Hutan Indonesia*.
- Ramadan, G., Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove petengoran di desa Gebang. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.11277>
- Rasyid, Y., & Purbaningrum, D. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Taman Kota Ii Di Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 2(1), 91–108.
- Revida, E., Purba, S., Kusumawati, I., Saragih, H., Zatira, D., Lisnawati, T., ... Yudaningsih, N. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Risa, N. E. W., Uspar, Alamsyah, R., Tenriwaruwaty, A., Wahyuni, A. P., & Liswahyuni, A. (2021). Peran Masyarakat Desa Pasimarannu Kabupaten Sinjai untuk Melindungi Pantai dari Ancaman Abrasi dengan Melakukan Penanaman Mangrove. *Tarjih: Agribusiness Development Journal*, 1(02), 32–40. <https://doi.org/10.47030/tadj.v1i2.298>
- Rizqi, A. A. A., Ningtias, A. W., Nadhifah, R., Aquarista, D. E., & Nurpratiwi, H. (2023). Penanaman Mangrove Guna Mengurangi Resiko Banjir Di Sine Kecamatan Kalidawir Tulungagung. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 21–35. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1678>
- Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial. *Fokus : Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*,

4(4), 279–284. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7413>

Saputra, E. (2019). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4).

Saru, A. (2019). *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir* (1 ed.). Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Siahaya, M. E., Salampey, M. L., Febryano, I. G., Rositah, E., Silamon, R. F., & Ichsan, A. C. (2016). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Konservasi Hutan Mangrove Di Wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*, 16(1), 12–17. <https://doi.org/10.31938/jns.v16i1.181>

Sugiyono. (2015). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 Cetakan ke-29). Bandung: Alfabeta.

Sutomo. (2020). *Institusi Lokal Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan* (1 ed.). Malang: Literasi Nusantara.

Syahri, M. (2013). Bentuk – Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i2.3423>

Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Institute.

Ulya, F. I., Yofita, E., Wulandari, F., & Desmawati, Y. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 84–98.

Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Unika Atma Jaya.

Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 10(2), 91–106. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1386>

Windayani, F. (2016). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Tingkat Partisipasi*

Masyarakat pada Program Ecovillage. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.